



**SUMBER BERITA**

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU	.....

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF   
  NETRAL   
  BAHAN PEMERIKSAAN   
  PERHATIAN KHUSUS

**Usut Dugaan Korupsi Anggaran DPRD**

**SELUMA** - Saat ini, dugaan korupsi atau penyelewengan anggaran untuk tunjangan perumahan dan kendaraan dinas anggota DPRD Seluma tahun 2018, terus diusut Kejari Seluma. Pengusutan ini setelah keluarnya laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Bengkulu tahun 2019 untuk audit anggaran di DPRD Seluma tahun 2018.

Dimana kuat dugaan ada penyelewengan atau korupsi yang terjadi. Saat ini Kejari Seluma terus melakukan pengumpulan barang bukti (pulbaket). Yakni dengan melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi-saksi yang dipanggil.

Kajari Seluma, Muhammad Ali Akbar, SH, MH melalui Kasi Pidsus, Ahmadi, SH mengatakan penanganan kasus tersebut masih berjalan. Pada saat ini penyidik masih akan melakukan pemeriksaan atau memintai keterangan terhadap saksi-saksi. Sejauh ini, penyidik Kejari Seluma telah melakukan pemanggilan terhadap beberapa saksi. Setidaknya sudah ada sebanyak 15 saksi yang sudah dimintai keterangan. Diantaranya anggota DPRD Seluma, pejabat lingkungan Sekretariat DPRD Seluma serta di Sekretariat di Pemkab Seluma.

"Untuk saat ini kita masih dalam proses memintai keterangan saksi-saksi," sampainya.

Sebelumnya, Kajari Seluma, Muhammad Ali Akbar, SH MH mengatakan bahwa pihaknya terus melakukan pengumpulan barang bukti dan keterangan saksi guna mengusut dan mengungkap dugaan korupsi tunjangan perumahan dan transportasi anggota DPRD Seluma periode 2018-2019 ini.

Sejauh ini, pihaknya sudah memanggil beberapa saksi untuk dimintai keterangan.

Pemanggilan itu guna mengumpulkan keterangan dan memastikan besaran tunjangan yang diberikan untuk perumahan dan kendaraan anggota DPRD Seluma tahun 2018. "Kita masih melengkapi semua barang bukti yang kita perlukan, baik keterangan saksi maupun bukti fisik dari realisasi anggarannya," sampai Kajari.

Dijelaskan Ali Akbar, jaksa juga telah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Bengkulu. Koordinasi itu untuk melihat besaran tunjangan perumahan dan transportasi anggota DPRD. Pihaknya juga berpatokan dengan kajian tim appraisal yang telah ada. Dimana besaran tunjangan perumahan dan transportasi ini tidak boleh melebihi dari Pemerintah Provinsi Bengkulu. "Jadi ini akan menjadi patokan kita dalam mengungkap dan mengusut ini," ujarnya.

Dari informasi yang diterima, terkait dengan adanya kasus dugaan indikasi manipulasi dalam pemberian tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi di Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma, yakni biaya yang diperuntukkan untuk seluruh anggota DPRD Kabupaten Seluma terkecuali unsur pimpinan DPRD Kabupaten Seluma. Dalam pengusutan kasus ini juga mengarah pada pihak yang menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup). Karena akibat dari perbup tersebut terjadi pembayaran yang cukup besar untuk sewa rumah dan kendaraan tanpa memperhatikan harga standar biaya sewa perumahan di seputaran Kota Tais serta memperhatikan hasil penilaian tim appraisal. Dengan penerbitan Perbup tersebut bahwa untuk tunjangan kendaraan sebesar Rp 12 juta serta tunjangan perumahan sebesar Rp 9 juta. (cup)